BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja

Pembangunan yang dewasa ini sedang digalakkan oleh pemerintah, telah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Kemajuan memang begitu pesat dialami pada semua sektor, terutama dalam sektor perekonomian. Usaha pemerintah dengan trilogi pembangunan yang unsur pokoknya adalah Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas, terasa kesuksesannya.

Pemerataan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, untuk itu merupakan kewajiban semua masyarakat untuk turut memacukannya, berkaitan dengan hal ini didalam GBHN disebutkan:

"Dengan makin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka makin meningkat pula kesejahteraan rakyat dan diharapkan dalam Pelita IV akan tercipta kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Hal ini akan meningkatkan kemampuan rakyat untuk membangun serta semakin memperbesar kesadaraan rakyat akan arti dan manfaat pembangunan, sehingga memperkuat tekad rakyat untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila."

Pandangan menyeluruh terhadap pembangunan menurut bangsa Indonesia yaitu membangun masyarakat secara bersama-sama antara rakyat dengan pemerintah. Untuk itu perlu adanya kemitraan yang baik antara pemerintah dengan rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah memerlukan beberapa sarana penunjang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis operasionalnya yaitu tersedianya dana yang sebanding dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya.

Kondisi keuangan negara dan keinginan yang kuat untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan, menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara sampai saat ini maupun dimasa yang akan datang. Dalam APBN yang jumlahnya terus meningkat, pajak menjadi andalan penerimaan negara untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Berbagai upaya penyempurnaan sistem perpajakan di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara disektor pajak. Reformasi perundang-undangan pajak yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan penerimaan pajak, juga memberikan akomodasi untuk menarik investor asing untuk melakukan penanaman modal yang akhirnya akan mendorong kenaikan penerimaan pajak. Sampai berapa besar peranan reformasi ini akan menunjang kearah itu sangatlah sukar untuk dievaluasi. Dengan dikeluarkannya Undang-undang perpajakan yang baru, dilandasi oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, telah membedakan dengan Undang-undang pajak zaman kolonial.

Upaya penerapan sistem Self Assessment terus digerakkan kini wajib pajak tidak lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang harus terus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebagai realisasi dari sistem Self Assessment, selanjutnya wajib pajak diberi kepercayaan

penuh untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Perkembangan dari penerimaan pajak yang menggembirakan khususnya pajak penghasilan, tidak lepas dari perubahan perUndang-undangan. Mungkin walaupun tanpa reformasi, kenaikan pajak akan terus berlangsung, sebagaimana akibat dari faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan jumlah wajib pajak yang terjaring, Inflasi yang meningkat dan peranan aparat perpajakan.

Salah satu sumber penerimaan dari sektor perpajakan diantaranya ialah Pajak Penghasilan, yang berasal dari rakyat, dimana cara pemungutannya diatur oleh Undang-undang yang ada pada dasarnya menyangkut subyek pajak atau siapa yang dikenai pajak dan obyek pajak atau dasar pengenaan, serta tarif pajak dengan pengenaan yang merata dan adil.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan lahirnya teknologi informasi khususnya media komputer sebagai alat utamanya maka sistem pelayanan perpajakan di Indonesia telah memakai teknologi komputerisasi dalam melayani para wajib pajak yang akan mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai individu yang taat dalam membayar pajak.

Dengan memakai teknologi komputer sebagai alat bantu dalam hal mempermudah pelayanan kepada para wajib pajak sehingga efisien dalam waktu dan tenaga.

Berawal dari latar belakang tersebut diatas, timbul keinginan untuk mengetahui sejauh mana suatu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menunaikan

tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak benar-benar memiliki kesadaran dalam menjalankan peranannya sebagai Warga Negara yang taat pajak.

Sebagai bahan laporan kerja praktek dibuatlah sebuah penulisan dengan judul yaitu: **"Prosedur Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega ".**

1.2 Maksud dan Tujuan Praktek Kerja

Kegiatan praktek kerja dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang kegiatan kerja secara nyata dilapangan. Didalam kegiatan praktik kerja tersebut akan diperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul laporan yang akan ditulis.

Sedangkan tujuan dari kegiatan praktek kerja ini adalah untuk mengetahui:

1) Lebih banyak menetahui mengenai perpajakan dan manfaatnya.
2) Prosedur penyetoran dan pelaporan oleh para wajib pajak.
3) Sejauh mana peran teknologi informasi dapat membantu kelancaran pelayanan terhadap para wajib pajak
4) Mengetahui prosedur serta tata cara penyetoran dan pelaporan pajak.

1.3 Kegunaan Praktek Kerja

Dari kegiatan praktek kerja yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada:

1) Pengembangan ilmu, dimana hasil pengumpulan data ini diharapkan dapat mengundang keingintahuan lebih lanjut terhadap masalah-masalah perpajakan yang dihadapi oleh masyarakan, sehingga mendorong keinginan untuk mengetahui penyebab dan pemecahan masalah-masalah tersebut.
2) Pengembangan profesi, diharapkan hasil pengumpulan data ini dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan pelayanan.
3) Memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang cara-cara mengatasi masalah perpajakan.
4) Untuk mengetahui kegiatan operasional dikantor pelayanan pajak.

1.4 Tempat Praktek Kerja

Praktek kerja dilakukan diKantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega yang berlokasi dijalan Soekarno-Hatta no.216 Bandung. Lokasi ini dipilih karena:

1) Lokasinya mudah dijangkau, terletak dipinggir jalan raya yang dapat ditempuh oleh berbagai jurusan.
2) Kantor tersebut sudah lama berdiri, sehingga untuk mencari data diharapkan lebih mudah.
3) Kantor tersebut cukup besar, sehingga banyak bagian yang dapat dipilih sebagai tempat praktik kerja.
4) Aktifitas cukup banyak, sehingga memberikan banyak kesempatan untuk berlatih.
5) Sistem informasi yang digunakan cukup memadai dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

1.5. Jadwal Praktek Kerja

Kegiatan praktek kerja dilakukan didalam semester IV (empat). Sebagai rincian waktunya adalah sebagai berikut :

a. Fase persiapan praktek kerja

Kegiatan dalam fase ini meliputi penetapan lokasi dan survei pendahuluan.

b. Fase pelaksanaan praktek kerja dan pengumpulan data

Meliputi kegiatan praktek kerja langsung di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega yang dilakukan pada tanggal 20 September 2003 s/d 30 September 2003.

c. Fase penulisan laporan

Meliputi pengolahan data dan catatan-catatan. Dilanjutkan dengan penulisan laporan yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober s/d 10 Oktober 2003.